



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2023**

**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp/Fax (0351) 749152, Email :
badankeuangan@ngawikab.go.id



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 148 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
36. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 130 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 56 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 56);
37. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun berpedoman pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HERSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 148



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2023**

**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp/Fax (0351) 749152, Email :
badankeuangan@ngawikab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan nikmatNya sehingga Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Tahun 2022. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Renja Badan Keuangan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja Badan Keuangan Tahun 2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2023 ini disadari masih terdapat kekurangan, namun seluruh jajaran aparatur Badan Keuangan Kabupaten Ngawi berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja guna terwujudnya pengelolaan Keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib.

Demikian semoga bermanfaat.

Ngawi, 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI



NIP. 19660409 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum.....	12
1.3. Maksud dan Tujuan.....	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	46
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	48
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	79
BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	81
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	81
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	88
BAB V PENUTUP.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Renja Perangkat Daerah	10
Gambar 2 SOTK Badan Keuangan.....	12
Gambar 3 Keselarasan dengan Kebijakan Nasional.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	18
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	50
Tabel 2.5 Usulan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022.....	80
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	89

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 148 TAHUN 2022
TENTANG
RANCANGAN AKHIR RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN KABUPATEN
NGAWI TA. 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra atuan Kerja Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan Kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyalarsan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun bersangkutan. Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2020 mempunyai fungsi penting dalam sistem Perencanaan Daerah karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan Strategis Jangka Menengah dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan harus berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2022;
2. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
3. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja;
4. Pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun, dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan antar suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan 2 dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah serta keuangan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi disusun berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Berkaitan hal tersebut acuan dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2023 adalah :

1. Evaluasi capaian kinerja pada Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (TW I tahun 2022), dengan prioritas upaya penyelesaian terhadap target-target yang belum tercapai;
2. Program Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
3. Sasaran pokok pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 misi ke-3 yaitu Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2023.



Gambar 1. Renja Perangkat Daerah

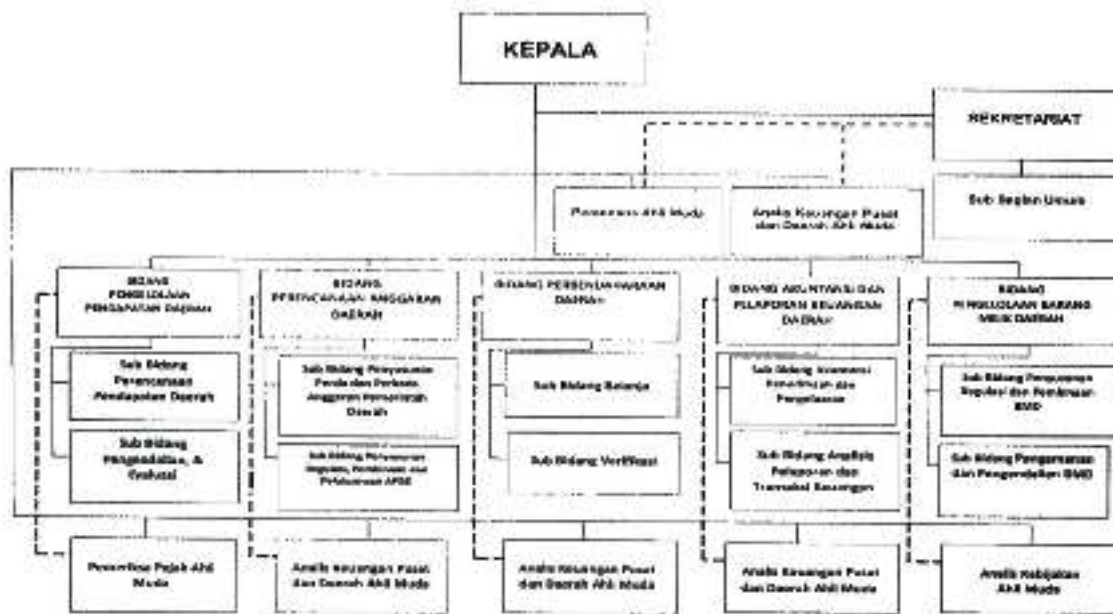
Mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Keuangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sebagai berikut:

- a. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan Keuangan;
- b. Penyusunan Kebijakan Teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan keuangan dan barang milik daerah; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Keuangan mempunyai kewenangan :

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- d. penyusunan rencana dan melaksanakan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah;
 - e. penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang RAPBD dan PAPBD;
 - f. penyusunan dan melaksanakan Kebijakan penatausahaan APBD;
 - g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. penyusunan dan melaksanakan kebijakan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - i. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - j. penyusunan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - k. penyusunan Laporan semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya;
 - l. melaksanakan Pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengkoordinasikan dan fasilitasi pendapatan daerah;
 - m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APBD;
 - n. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
 - o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - p. melakukan penagihan piutang daerah;
 - q. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - r. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah daerah;
 - s. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - t. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan tentang pengelolaan barang milik daerah;
 - u. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- Susunan Organisasi Badan Keuangan yaitu sebagai berikut :



Gambar 2. SOTK Badan Keuangan

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2023 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan.

Tujuan disusunnya Renja Badan Keuangan Tahun 2023 adalah :

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA SKPERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renja Badan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagaimana gambar dibawah ini :

BAB I.	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
	2.2 Analisis Kinerja Belayaran PD
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PD
	3.1 Teraahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran renja PD
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BAB V.	PENUTUP

Gambar 3. Sistematika Penulisan Renja

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui: 1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Badan Keuangan menetapkan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan total pagu Badan Keuangan berjumlah Rp. 461.477.235.168,00 dan terealisasi sebesar Rp. 457.199.049.348,00 yaitu 99,37 % mengampu 4 Program, 14 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Jumlah program yang tidak mencapai target sebanyak 2 program, jumlah kegiatan yang tidak mencapai target sejumlah 3 kegiatan. Berdasarkan target kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan rutin operasional yang pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan yang terkadang waktu dan pelaksanaannya tidak bisa diperkirakan dan bersifat insidental;
2. Kegiatan rapat koordinasi keluar daerah dan dalam daerah serta untuk mengikuti diklat/bimtek/kursus/seminar/workshop tergantung pada undangan dari penyelenggara. Masih berlakunya kebijakan PPKM menjadi kendala untuk menyelenggarakan acara yang sifatnya tatap muka;
3. Ada indikator yang sudah ditetapkan targetnya namun tidak terealisasi karena pagu anggaran digeser kegiatan lain yang lebih prioritas.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022 total pagu Badan Keuangan Rp. 438.061.206.412,00 mengampu 4 program, 14 kegiatan, 58 sub

kegiatan dan realisasi sampai dengan TW. I sejumlah Rp. 33.012.202.807,00. Berdasarkan target kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi penyerapan anggaran karena menunggu penyesuaian nomenklatur baik pada kecukupan administrasi maupun pada system aplikasi yang digunakan.
2. Menyesuaikan waktu pelaksanaan anggaran per bulan (anggaran kas) yang sudah ditetapkan.
3. Penerapan aturan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1.

5.25.2.11 2.01	Perencanaan Peningkatan SD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja OPERANGKAT DAERAH yang disusun tepat waktu		1,055,160,000			194,100,000		177,946,000	92%		57,016,000		7,733,500	4%
5.25.2.1 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPERANGKAT DAERAH yang disusun	4 Dok u k	95,160,000.00			14,160,000		13,150,000	94%		9,250,000		4,625,000	33%
		Jumlah Dokumen Perencanaan OPERANGKAT DAERAH yang disusun	11 Dok u me n				11 Dok u me n		11 Dok u me n			11 Dok u me n		5 Dok u me n	
5.25.2.1 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja OPERANGKAT DAERAH yang disusun	5 Dok u me n	945,000,000.00			180,000,000		164,346,000	91%		47,046,000		3,108,500	2%
5.25.2.11 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan laporan Keuangan yang disusun tepat waktu		1,43,545,141,055			18,171,093,316		17,660,808,7 92	97%		14,310,069,070		1,019,574,296	6%
5.25.2.1 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	112 o r b	143,020,340,706			18,164,936,316		17,654,801,2 92	97%		14,301,117,079		1,016,551,506	6%
		Jumlah Dokumen Pangajuan Laj dan Tunjangan ASN yang disusun	28 Dok u me n				28 Dok u me n		28 Dok u me n			28 Dok u me n		5 Dok u me n	

5.2.5.2.1 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Skperangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun	48 Laporan	44,854,100		48 Laporan	6,757,000	48 Laporan	6,057,000	90%	48 Laporan	6,757,000	12 Laporan	3,022,700	45%
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	2 Laporan	-		2 Laporan		2 Laporan			2 Laporan		0 Laporan	-	
5.2.5.2.1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembinaan ASN yang disiplin dalam bekerja		1,710,776,000			208,364,000	552	-	195,568,100	94%	551	-	208,799,250	0%
5.2.5.2.1 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli / diadakan	240 Meter	538,148,000		240 Meter	93,040,000	235 Meter	82,412,000	89%	255 Meter	71,058,750	0 Meter	-	0%
		Jumlah Pelasok Botak yang dibeli / diadakan	150 Potong	-		150 Potong		170 Potong			170 Potong		0 Potong	-	
		Jumlah Pakaian Cetak Raga yang dibeli / diadakan	85 Seal	-		85 Seal		85 Seal			85 Seal		0 Seal	-	
5.2.5.3.1 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	40 Orang	1,176,631,000		40 Orang	115,824,000	40 Orang	113,356,100	98%	40 Orang	137,650,500	0 Orang	-	0%
		Jumlah Diklat / Pelatihan yang diadakan	1 Kali	-		1 Kali		1 Kali			1 Kali		0 Kali	-	

5.2.5.2.1.1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun		3,001,400,000			401,540,000		351,040,075	87%		495,140,350	5,726	33,118,950	8%
5.2.5.2.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	100 %	84,000,000		100 %	12,000,000	100 %	11,971,700	100 %	100 %	5,032,350	0 %	1,730,000	10%
5.2.5.2.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ATK	100 %	912,017,500		100 %	150,980,000	100 %	147,955,000	98%	100 %	132,017,000	10 %	-	0%
5.2.5.2.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	230 Kotak	435,450,000		2300 Kotak	43,722,000	2300 Kotak	37,807,000	86%	2300 Kotak	37,640,000	70 Kotak	9,225,000	21%
5.2.5.2.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Barang yang Dicetak	483 Lembar	417,091,000		4839 Lembar	62,091,000	4839 Lembar	60,861,000	98%	4839 Lembar	98,451,000	20 Lembar	-	0%
		Jumlah Barang yang Digandakan	250 Lembar	-		2500 Lembar	-	2500 Lembar	-		2500 Lembar	-	10 Lembar	-	
5.2.5.2.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Buah	418,028,000		12 Buah	35,697,000	12 Buah	15,200,000	45%	12 Buah	111,329,000	0 Buah	-	0%
		Jumlah Paket Kikan yang disediakan	1 Paket	-		1 Paket	-	1 Paket	-		1 Paket	-	0 Paket	-	
		Jumlah Surat Kabar yang disediakan	36 Eksemplar	-		36 Eksemplar	-	36 Eksemplar	-		36 Eksemplar	-	3 Eksemplar	-	

5.2.5.2.1 1.2.05.9	Pemertanggung- raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANSK AT DAERAH	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar yang dibeli / diletak	40 Kali	1,274,317,000		40 Kali	99,050,000	40 Kali	77,249,875	78%	40 Kali	110,654,000	13 Kali	22,663,950	23%
5.2.5.2.1 1.2.07	Pengadaan barang MILK Daerah Peninggal Luaran Pemerintah Daerah	Pemngase ASN yang diadipn dalam setahun		2,601,898,500			155,497,000	33	180,591,000	97%	33	181,500,400			0%
5.2.5.2.1 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan	0 Unit	941,293,000		0 Unit		0 Unit			0 Unit		0 Unit		
5.2.5.2.1 1.2.07.5	Pengadaan Meubel	Jumlah Meubelir yang dibel / diadakan	5 Unit	162,687,600		5 Unit	9,387,000	5 Unit	9,356,000	99%	5 Unit		0 Unit		0%
5.2.5.2.1 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin Alatnya yang diadakan	1 Unit	1,345,346,000		1 Unit	173,423,000	1 Unit	168,140,000	97%	1 Unit	167,093,400	0 Unit		0%
		Jumlah Peralatan Kerja yang dibeli / diadakan	24 Unit			24 Unit		24 Unit			24 Unit		0 Unit		
5.2.5.2.1 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	162,682,000		3 Unit	12,682,000	3 Unit	12,116,000	96%	3 Unit	14,500,000	0 Unit		0%

5.2.5.2.1.1 7.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Limbah Padat di Wilayah Daerah	Prevention Pemeliharaan Kebersihan Administrasi Daerah dalam setahun			5,674,882,000			1,150,387,000		1,030,263,500	90%		1,116,604,900		103,432,811	10%
5.2.5.2.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Kirim	200 Surat		18,400,000			2,500,000	200 Surat	434,500	17%	200 Surat	2,300,000	17 Surat		0%
5.2.5.2.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumbat Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Sewa Hosting / vps yang dibayar	1 Paket		2,698,738,000			508,233,000	1 Paket	497,512,410	97%	1 Paket	447,442,000	0 Paket	35,290,811	7%
		Jumlah Rekening Air yang dibayar	12 Rekening		-			-	12 Rekening	-	-	-	12 Rekening	3 Rekening	-	-
		Jumlah Rekening Listrik yang dibayar	12 Rekening		-			-	12 Rekening	-	-	-	12 Rekening	3 Rekening	-	-
		Jumlah Rekening Telepon / internet yang dibayar	12 Rekening		-			-	12 Rekening	-	-	-	12 Rekening	1 Rekening	-	-
		Jumlah Rekening Telekomunikasi yang dibayar	12 Rekening		-			-	12 Rekening	-	-	-	12 Rekening	3 Rekening	-	-
5.2.5.2.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengklapan Kantor	Jumlah alat dan Bahan Kebersihan yang dibeli	103 Buah		207,582,000			32,652,000	103 Buah	29,082,000	89%	103 Buah	58,541,900	0 Buah	12,811,900	38%
		Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan	18 Orang / Bulan		-			-	18 Orang / Bulan	-	-	-	18 Orang / Bulan	3 Orang / Bulan	-	-
5.2.5.2.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sewa Pes yang diadakan	816 Buah		3,758,812,000			607,012,000	816 Buah	508,730,000	84%	816 Buah	558,120,000	21 Buah	61,200,000	10%

		Jumlah Lembur yang dibayarkan (Jumlah Orang x Jam)	211 Orang /jam	-			2116 Orang /jam		2116 Orang /jam		2116 Orang /jam		0 Orang /jam	-	
		Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah Orang x Bulan)	150 Orang / Bulan	-			150 Orang / Bulan		150 Orang / Bulan		150 Orang / Bulan		0 Orang / Bulan	-	
5.2.5.2.1.1.2.09	Pemeliharaan Borong Muk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perorangan / Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dalam setahun		1,588,760,000			217,310,000		196,643,800	90%		200,620,000		145,867,500	67%
5.2.5.2.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar pajaknya	1 Unit	320,610,000			40,510,000		39,489,500	97%		16,000,000		3,492,000	9%
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit / Tahun	-			1 Unit / Tahun		1 Unit / Tahun		1 Unit / Tahun		1 Unit / Tahun	-	
5.2.5.2.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayar pajaknya	39 Unit	445,500,000			57,500,000		42,754,300	81%		28,900,000		4,405,800	8%

		Jumlah Pemeliharaan Mobil Dinas / Operasional (111 Unit Kendaraan s.dlm Pemeliharaan)	1 Unit / Tahun			1 Unit / Tahun		1 Unit / Tahun		1 Unit / Tahun		0 Unit / Tahun			
5.2.5.2.1 1.2.09.6	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan Kerja yang dipelihara (111 Unit s.dlm Pemeliharaan)	45 Kali	224.400,000		45 Kali	14,950,000	45 Kali	7,865,000	53%	45 Kali	14,720,000	0 Kali	0%	
5.2.5.2.1 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	1 Paket	35,000,000		1 Paket	92,000,000	1 Paket	80,925,000	98%	1 Paket	141,000,000	0 Paket	150%	
5.2.5.2.1 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (111 Unit s.dlm Pemeliharaan)	2 Unit	571.250.000		2 Unit	17,250,000	2 Unit	16,590,000	96%	2 Unit		0 Unit	0%	
5.2.5.2.1.2	PROGRAM PERGELOLAAN KEBANGLAN OPERASIONAL	Persentase Dokumen penyusunan anggaran APBD yang disusun sesuai Regulasi dan tepat waktu		2,844,882,137,114	0		437,727,646,252		194,270,011,381	58%		418,605,651,283		31,473,725,906	7%
5.2.5.2.1.2.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Regulasi Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu		7,979,126,300			1,206,602,000		1,111,948,400	92%		1,682,353,850		101,171,100	8%

5.2.5.2.1 2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA yang disusun	1 Dokumen	1.347,142,000			1 Dokumen	109,095,000	1 Dokumen	101,242,000	93%	1 Dokumen	118,277,500	0 Dokumen	-	0%
		Jumlah Dokumen PPAS yang disusun	1 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen		0 Dokumen	-	
5.2.5.2.1 2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA yang disusun	1 Dokumen	474,333,500			1 Dokumen	22,980,000	1 Dokumen	58,417,000	80%	1 Dokumen	100,000,000	0 Dokumen	28,615,000	38%
		Jumlah Dokumen Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen		0 Dokumen	-	
5.2.5.2.1 2.2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	94 Dokumen	140,453,500			94 Dokumen	9,300,000	94 Dokumen	7,460,000	80%	94 Dokumen	70,540,000	0 Dokumen	-	0%
		Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang diverifikasi	94 Dokumen				94 Dokumen		94 Dokumen			94 Dokumen		0 Dokumen		#DI V/01
5.2.5.2.1 2.2.01.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	94 Dokumen	182,182,500			94 Dokumen	11,675,000	94 Dokumen	8,835,000	76%	94 Dokumen	28,830,000	94 Dokumen	-	0%

		Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang diverifikasi	94	Dokumen	-			94	Dokumen			94	Dokumen			47	Dokumen			
5.2.5.2.1 2.1.01.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun & A.A.	0	Dokumen	28,825,000			0	Dokumen			0	Dokumen			47	Dokumen			
		Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang diverifikasi A.A.A	0	Dokumen	-			0	Dokumen			0	Dokumen			47	Dokumen			
5.2.5.2.1 2.2.01.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun	47	Dokumen	24,525,000			47	Dokumen			47	Dokumen			0	Dokumen			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang diverifikasi	47	Dokumen	-			47	Dokumen			47	Dokumen			0	Dokumen			
5.2.5.2.1 2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup APBD yang disusun dalam 1 tahun	1	Dokumen	2.573.855,200			1	Dokumen	671,800,000		1	Dokumen	615,658,500	92%	1	Dokumen	705.059,350	56,485,500	8%
		Jumlah Perda APBD yang disusun dalam 1 tahun	1	Dokumen	-			1	Dokumen			1	Dokumen			0	Dokumen			

5.2.5.2.1 2.2.02.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perubahan APBD yang disusun dalam 1 tahun	1 Dokumen	2,240,983,100			1 Dokumen	391,812,000	1 Dokumen	370,335,600	97%	1 Dokumen	648,837,000	1 Dokumen	16,020,600	5%
		Jumlah Perda APBD yang disusun dalam 1 tahun	1 Dokumen	-			1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen		0 Dokumen		
5.2.5.2.1 2.2.02.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Biotak Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	0 Kali	968,828,500			0 Kali		0 Kali			0 Kali		0 Kali		
		Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan APBD	0 Dokumen	-			0 Dokumen		0 Dokumen			0 Dokumen		0 Dokumen		
		Jumlah Regulasi yang disusun	0 Dokumen				0 Dokumen		0 Dokumen			0 Dokumen		0 Dokumen		
5.2.5.2.1.2 2.02	Koordinasi dan Pengkajian Perbendaharaan Daerah	Pemantauan Laporan / Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu		1,841,542,800				526,750,400		496,573,000	95%		967,808,000		178,357,000	23%
5.2.5.2.1 2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Ilerian	264 Laporan	869,878,500			264 Laporan	91,042,000	264 Laporan	90,807,000	100%	264 Laporan	214,416,000	0 Laporan	21,094,000	23%

5.2.5.2.1 2.2.02.2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	2 Laporan	33,480,000			2 Laporan	1,000,000	2 Laporan	800,000	80%	2 Laporan		1 Laporan	-	0%
5.2.5.2.1 2.2.02.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengambilan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SKPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	143 Surat	2,850,121,000			1430 Surat	15,800,000	1543 Surat	349,009,500	99%	1543 Surat	246,899,000	42 Surat	87,175,500	28%
		Jumlah SKPD yang diterbitkan	282 Surat	-			282 Surat		282 Surat			282 Surat		64 Surat	-	
		Jumlah SPM yang diteliti	143 Surat	-			1430 Surat		1543 Surat			1543 Surat		42 Surat	-	
5.2.5.2.1 2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dan Koordinasi Dana Transfer	50 Laporan	176,094,200			50 Laporan	10,072,200	57 Laporan	2,083,000	78%	57 Laporan	24,100,000	1 Laporan	1,560,000	15%
		Jumlah LKT (Laporan Konfirmasi Transfer)	4 Laporan				4 Laporan		4 Laporan			4 Laporan		1 Laporan	-	

5.2.5.2.1 2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Atrial Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pembotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PIK)	Jumlah Laporan Gaj	14 Kali	890.635,000		14 Kali	57,425,000	14 Kali	43,053,500	75%	14 Kali	160,170,000	3 Kali	6,332,500	11%
		Jumlah Laporan Kas Mingguan	48 Laporan	-		48 Laporan		48 Laporan			48 Laporan		0 Laporan	-	
		Jumlah Pembungan SP2D	4 Kali	-		4 Kali		5 Kali			5 Kali		2 Kali		
		Jumlah Rekonsiliasi Gaj	12 Kali	-		12 Kali		12 Kali			12 Kali		0 Kali		
		Jumlah SKPP yang diterbitkan	525 Surat	-		525 Surat		560 Surat			560 Surat		14 Surat		
5.2.5.2.1 2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penyetoran Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi RKU	8 Kali	180.964,200		8 Kali	7,780,500	11 Kali	4,410,000	57%	13 Kali	22,158,000	0 Kali	1,890,000	26%
		Jumlah Rekonsiliasi DTH / RTH	13 Kali	-		13 Kali		13 Kali			13 Kali		6 Kali		
		Jumlah Rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jalin	264 Kali	-		264 Kali		264 Kali			264 Kali		0 Kali		

		Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional	8 Lap oran		8 Lapo ran		8 Lapo ran		8 Lapo ran		8 Lapo ran		8 Lapo ran	
5.2.5.2.1.2 2.63	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Rekonsiliasi dan Verifikasi		0,436,862,000		868,977,000		661,823,700	98%		024,078,000		55,055,000	8%
5.2.5.2.1.2.2.03.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Akuntabel Perencanaan Kas Daerah	12 Kali	723,101,000		62,288,000		61,806,500	99%	12 Kali	105,310,000		33,870,000	54%
		Jumlah Pelaksanaan Standarisasi Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah	11 Kali			13 Kali				13 Kali			3 Kali	
		Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memotril yang dilakukan	12 Kali			12 Kali				12 Kali			3 Kali	
5.2.5.2.1.2.2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Ases, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LD dan Beban	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembayaan A.A.A	94 Kali	710,588,000		84,785,000		64,294,500	98%	94 Kali	121,560,000		17 Kali	0%

5.2.5.2.1 2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan	5 Kali	887.329.000			8 Kali		8 Kali	97%	8 Kali		0 Kali		0%
						58.094.000		54.528.200							
5.2.5.2.1 2.2.03.4	Konsolidasi laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PMMD	47 Laporan	91.168.000		189.310.000		182.829.000		97%	47 Laporan	90.388.000	7 Laporan		0%
5.2.5.2.1 2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	12 Kali	1.081.348.000		93.820.000		93.165.500		99%	12 Kali	136.225.000	7 Kali		0%
5.2.5.2.1 2.2.03.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	4 Dokumen	350.160.000							4 Dokumen	58.872.000	2 Dokumen		

5.2.5.2.1 2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	0 Dokumen	659.752,000			0 Dokumen	132.364,000	0 Dokumen	131.673,500	99%	0 Dokumen	190.758,000	0 Dokumen	21.185,000	105%
		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali	-			2 Kali		2 Kali			2 Kali		0 Kali		
5.2.5.2.1 2.2.03.11	Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	1 Kali	1.314.476,000			1 Kali	50.316,000	1 Kali	49.526,000	98%	1 Kali	151.388,000	0 Kali		0%
5.2.5.2.1 2.04	Pertunjang Urusan Keuangan Pengeluaran Keuangan Daerah	Persentase Laporan / Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu		2.926.988.035,54				435.331.316,952		432.003,671,291	99%		415.430.910,433	213	31.199.397,800	7%
5.2.5.2.1 2.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan ADD (213 x 4 tahap)	852 Desa	2.790.853.811,085			852 Desa	417.510.721,000	852 Desa	417.501.358,000	100%	852 Desa	385.478.408,000	213 Desa	31.188.387,000	7%
		Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan DD (213 desa x 2 tahap)	426 Desa				426 Desa		426 Desa			426 Desa		0 Desa		

		Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan SARPRAS Pedesaan	213 Desa	-		213 Desa		213 Desa			213 Desa		0 Desa		
		Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan INSENTIF RT	5604 RT	-		5604 RT		5604 RT			5604 RT		0 RT		
		Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan INSENTIF RW	1212 RW	-		1212 RW		1212 RW			1212 RW		0 RW		
		Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan BINA MITRA	5 Desa	-		5 Desa		5 Desa			5 Desa		0 Desa		
5.2.3.2.1 3.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah SP2D RT yang diterbitkan	60 Dokumen	-	68.468,780,000	60 Dokumen	5,352,188,552	60 Dokumen	3,970,478,475	74%	60 Dokumen	12,582,905,933	0 Dokumen	30,000,000	1%
5.2.5.2.1 2.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	213 Desa	-	68,664,384,031	213 Desa	12,468,396,400	213 Desa	10,531,935,805	84%	213 Desa	7,389,595,500	0 Desa		0%
		Jumlah SP2D Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	426 Dokumen	-		426 Dokumen		426 Dokumen			426 Dokumen		0 Dokumen		

		Jumlah Dokumen Pengajuan Usulan Pemanfaatan BMD	1	Dokumen	-			1	Dokumen			1	Dokumen			0	Dokumen			
		Jumlah SKPD yang menyampaikan IKRMD	47	Laporan	-			47	Laporan			47	Laporan			47	Laporan			
		Jumlah SK Penetapan Status Penggunaan yang diusulkan	47	Laporan	-			47	Laporan			47	Laporan			0	Laporan			
5.2.5.2.1 3.2.01.5	Pembastuhan Barang Milik Daerah	Jumlah inventaris jenis BMD yang dicatat	5	Laporan	1,259,342,004			5	Laporan	306,823,900		296,878,700	97%	5	Laporan	219,080,000		2	Laporan	0%
5.2.5.2.1 3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Asli Kepemilikan BMD yang disimpan	2	Dokumen	1,741,889,342			2	Dokumen	199,820,000		182,948,840	92%	2	Dokumen	211,775,000		0	Dokumen	0%
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengamanan BMD yang dilaksanakan	2	Laporan	-			2	Laporan					2	Laporan			0	Laporan	
5.2.5.2.1 3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen usulan Pemindahtanganan yang dilaksanakan	2	Dokumen	1,672,373,603			2	Dokumen	156,455,800		151,076,000	97%	2	Dokumen	173,541,000		0	Dokumen	0%

		Jumlah Dokumen Usulan Penghapusannya dilaksanakan	15 Dokumen		15 Dokumen		15 Dokumen		15 Dokumen		15 Dokumen		0 Dokumen			
5.2.5.2.1 5.2.01.11	Keefektifan dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Revisi yang dilakukan	2 Kali	1.129.209,877		2 Kali	88.961.800		2 Kali	87.755.000	99%	2 Kali	130.211.000	1 Kali	15.375.000	22%
5.2.5.2.1.4	PROGRAM PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penyusunan Rencana, Penghapusan, Pengelolaan dan realisasi Pendapatan Daerah, Kategori Baik		14.984.540,000			2.455.071,500			2.405.156,750	98%		1.915.783,150		159.082.050	6%
5.2.5.2.1.4 2.01	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Penyusunan Perda / Perbup tentang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah		14.984.540,000			2.455.071,500			2.405.156,750	98%		1.915.783,150		159.082.050	6%
5.2.5.2.1 4.2.01.1	Persentase pengelolaan pajak daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pendapatan	1 Dokumen	753.091,000		1 Dokumen	198.064,000		1 Dokumen	191.779,000	96%	1 Dokumen	39.410,000	1 Dokumen	23.200,000	12%
		Jumlah Pendampingan	2 Kali	-		2 Kali	-		2 Kali	-		2 Kali	-	0 Kali	-	
		Jumlah Survey Roboto Pajak Daerah	100 Wajib Pajak	-		1000 Wajib Pajak	-		990 Wajib Pajak	-		990 Wajib Pajak	-	25 Wajib Pajak	-	

5.2.5.2.1 4.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Simbol yang diselenggarakan	0 Kali	595,890,000		0 Kali	179,278,000	0 Kali	166,840,000	93%	0 Kali	29,299,000	0 Kali	27,679,000	15%
		Jumlah Koordinasi tentang Pengembangan Pajak Daerah	2 Kali	-		2 Kali		2 Kali			2 Kali		0 Kali		
5.2.5.2.1 4.2.01.5	Penelitian dan Pendefinisian Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pembahasan Objek Pajak Daerah	3 Dokumen	6,675,804,000		3 Dokumen	33,580,000	3 Dokumen	33,245,000	99%	3 Dokumen	14,460,000	0 Dokumen	3,970,000	12%
5.2.5.2.1 4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Monitoring Pendapatan Daerah dan PIS	19 Kali	122,480,000		19 Kali	8,520,000	19 Kali	9,096,000	96%	19 Kali	12,340,000	1 Kali		0%
		Jumlah Pemecatan Objek Pajak Daerah	12 Kali	-		12 Kali		12 Kali			12 Kali		3 Kali		
5.2.5.2.1 4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Pajak Daerah yang dipelihara	1 Aplikasi	1,400,836,000		1 Aplikasi	1,203,481,000	1 Aplikasi	1,185,451,000	99%	1 Aplikasi	1,150,010,150	0 Aplikasi		0%
		Jumlah DIMP, SPPT, dan SKPD yang dicetak	10 Box	-		10 Box		10 Box			10 Box		7 Box		

		Jumlah Objek Pajak yang ditetapkan	640 750	OP	-		6407 50	OP		6407 50	OP		6407 50	OP		49 00 00	OP			
		Jumlah Pajak yang ditetapkan	660 0	Wajib Pajak	-		6600 Wajib Pajak			6600 Wajib Pajak			6600 Wajib Pajak			51 50	Wajib Pajak			
		Jumlah Pendampingan	2	Kali	-		2	Kali		2	Kali		2	Kali		0	Kali			
		Jumlah SPP dan SKPD yang dicetak	109 175 0	Lembar	-		1091 750	Lembar		1091 750	Lembar		1091 750	Lembar		55 50 00	Lembar			
		Jumlah Hibah dan Pajak (Draeur Pamflet, dll)	100 0	Lembar	-		1000	Lembar		1000	Lembar		1000	Lembar		0	Lembar			
5.2.5.2.1 4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Konsultasi Pajak Daerah	4	Kali	200,244,000		4	Kali	12,400,000	4	Kali	12,455,000	100%	4	Kali	4,064,000	0	Kali	0%	
		Jumlah Pendampingan Pajak Daerah	4	Kali	-		4	Kali		4	Kali			4	Kali		0	Kali		
5.2.5.2.1 4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan tepat Waktu	12	Laporan	624,619,000		12	Laporan	65,545,000	12	Laporan	65,540,500	100%	12	Laporan	77,365,000	3	Laporan	33,857,500	52%
5.2.5.2.1 4.2.01.11	Pemagihan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi / Pemagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan	195	Kali	1,353,310,000		195	Kali	169,878,500	195	Kali	165,767,550	100%	195	Kali	147,088,000	58	Kali	24,523,650	16%

3.2.5.2.1 4.7.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang di laksanakan	24	Lap ora n	4.250.288,000				24	Lapo ra n	585.154,000			24	Lapora n	580.982,70 0	99%	24	Lapora n	444.767,000	6	Lapo ra n	43.002,000	8%
------------------------	--	---	----	-----------------	---------------	--	--	--	----	-----------------	-------------	--	--	----	-------------	-----------------	-----	----	-------------	-------------	---	-----------------	------------	----

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kondisi target dan capaian kinerja dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT sebagai berikut :

1. Strength (kekuatan) Internal

- a. Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
- b. Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” berturut-turut atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2013-2021. Hal ini menjadi pemicu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah ke depannya agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan *reliable*
- c. Memiliki sarana Prasarana dan Sistem Informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Weaknesses (Kelemahan), Internal

- a. Perubahan Regulasi dan Penerbitan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi
- b. Terbatasnya sumber daya aparatur dibandingkan dengan beban kerja

3. Opportunities (Peluang) External

- a. Tugas pokok dan Fungsi strategis dalam rangka fasilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah

4. Treats (ancaman) external

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sering terlambat menyampaikan laporan keuangan

- b. Banyaknya sumber daya aparatur yang memasuki masa purna tugas/ pensiun sehingga diperlukan adanya tambahan pegawai baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya.
- c. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi Peraturan Perundang-undangan yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang

Kinerja Perangkat Daerah di analisis berdasarkan jenis indikator yang ditetapkan pada masing-masing program kegiatan sesuai tugas pokok fungsi. Mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan. Didukung dengan Aparatur Sipil Negara keseluruhan sejumlah 76 (Tujuh Puluh Enam) orang. Untuk mengevaluasi Kinerja dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan yaitu :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
IKU tersebut didukung oleh 1 indikator program yaitu Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun
2. Persentase tingkat kualitas pengelolaan keuangan kategori tertib;
IKU tersebut didukung oleh 4 indikator yaitu
 - a. Persentase PAD terhadap APBD
 - b. Persentase Dokumen penyusunan anggaran APBD yang disusun sesuai regulasi dan tepat waktu
 - c. Prosentase ketepatan waktu realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - d. Persentase dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun sesuai SAP dan tepat waktu
3. Persentase tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah tertib dalam penatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan kategori tertib;
IKU tersebut didukung oleh 1 indikator program yaitu
 - a. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib

Kinerja Badan Keuangan secara keseluruhan telah memenuhi target yang direncanakan sebagaimana dilihat di tabel 2.2.

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi**

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	-	-	97,90%	97,90%	97,90%	98,00%	97,90%	42,06%	97,90%	98,00%	
			Persentase Belanja Pendidikan		-	20%	20%	-	-	20%	20%	
			Persentase Belanja Kesehatan	-	-	10%	10%	-	-	10%	10%	
			Persentase SILPA (sudah termasuk jumlah laporan silpa)	-	-	6,70%	6,70%	-	-	6,70%	6,70%	
			Persentase SILPA terhadap APBD	-	-	15%	15%	-	-	15%	15%	

		Persentase Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	-	-	25%	25%	-	-	25%	25%	
		Penetapan APBD	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
		Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	10%	10%	-	-	10%	10%	
		Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-	-	1%	1%	-	-	1%	1%	
		Rasio anggaran sisa thd total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	-	-	0.10%	0.10%	-	-	0.10%	0.10%	
		persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer Expenditures)	-	-	1.00%	1.00%	-	-	1.00%	1.00%	

			Persentase Jumlah Bagi Hasil Kab/Kota dan Desa yang dikelola	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
			Persentase Deviasi realisasi PAD thd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	-	-	0.86%	0.86%	-	-	0.86%	0.86%
			Transparansi dan Partisipasi Publik	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
2	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib	-	-	95.01%	95.03%	95.05%	95.10%	95.01%	17.08%	95.05%	95.10%
		-	Manajemen Aset	95.01%	95.03%	95.05%	95.10%	95.01%	17.08%	95.05%	95.10%
		-	Transparansi dan Partisipasi Publik	-	-	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%
		-	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	-	-	100%	100%	80%	99%	100%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan kondisi , atau permasalahan yang bersifat mendesak dan harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan, karena dampak yang signifikan baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan. Isu strategis, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Ngawi. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokrasi. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi masalah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Ngawi pada tahun 2023. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahun 2021-2026 maka ditetapkan isu strategis Kabupaten Ngawi Tahun 2023 salah satunya Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut maka Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang melalui berbagai cara dengan tujuan, efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efisien, pemerintah perlu untuk menerapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi birokrasi yang termuat dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat mudah dipahami dan dilaksanakan oleh berbagai pihak hingga stakeholder yang terlibat. Regulasi yang mengatur tentang Reformasi Birokrasi, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dimana

dalam regulasi tersebut terdapat 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan SDM Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta yang terbaru yaitu UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan regulasi tersebut berdampak pada perubahan implementasi pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan pendapatan dan anggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan keuangan. Peningkatan sumber daya manusia yang merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan Perangkat Daerah pada Renja Badan Keuangan yang dijabarkan dari permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 terkait Pengelolaan keuangan daerah yang masih harus ditingkatkan, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan pengelola: BMD kategori baik.
2. Identifikasi potensi sumber pendapatan yang belum optimal.
3. Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur yang belum merata dan memadai.

Permasalahan tersebut berdampak pada pencapaian visi misi Kepala Daerah dimana aparaturnya dituntut memberikan pelayanan prima dan arah pembangunan nasional yang berorientasi salah satunya pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk itu perlu dirumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan

- a. Menetapkan Peraturan Daerah terkait Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Memaksimalkan sumber daya aparaturnya yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- c. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- e. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.
- f. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah agar sesuai dan dapat mengakomodir seluruh program/kegiatan, lokasi, indicator,

target dan kebutuhan anggaran tahun 2023 dalam menjalankan visi dan misi Kabupaten Ngawi sesuai dengan tugas dan fungsi, sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah						Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	BADAN KEUANGAN				525.878.838.349	BADAN KEUANGAN				468.558.716.403
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun	Badan Keuangan	100 %	22.420.476.089	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun	Badan Keuangan	100 %	23.297.514.988
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	184.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	163.741.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan OPD yang disusun	Badan Keuangan	4 Dokumen	14.000.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan OPD yang disusun	Badan Keuangan	4 Dokumen	22.392.000

	Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	Badan Keuangan	22	Dokumen		Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	Badan Keuangan	22	Dokumen		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Keuangan	1	Dokumen	9,400,000
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Keuangan	1	Dokumen	6,000,000
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan Keuangan	2	Dokumen	7,360,000
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Badan Keuangan	2	Dokumen	5,162,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun	Badan Keuangan	7	Dokumen	170,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Keuangan	7	Laporan	113,427,000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	19,562,591,589	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	19,562,213,658
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Yang disusun	Badan Keuangan	14	Dokumen	19,555,276,588.57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Keuangan	1976	Orang /Bulan	19,555,276,658
	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Badan Keuangan	85	Orang			Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	Badan Keuangan	26	Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Akutansi dan pelaporan keuangan yang disusun	Badan Keuangan	12	Dokumen	7.315.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Keuangan	50	Dokumen	6,937,000
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun	Badan Keuangan	12	laporan							
	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Badan Keuangan	2	laporan							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	374,367,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	386,362,500
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	85	Buah	89.600.000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Keuangan	2	paket	83,280,000

	Jumlah Pakain Batik yang dibeli/diadakan		0	Potong							
	Jumlah Pakain Korpri yang di beli / diadakan	Badan Keuangan	85	Potong							
	Jumlah pakain olah raga yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	85	Stel							
	Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	0	Pasang							
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta diklat formal	Badan Keuangan	40	Orang	284,767,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Badan Keuangan	40	Orang	303,082,500
	Jumlah Diklat dan pelatihan yang diadakan	Badan Keuangan	2	Kali			Jumlah Diklat dan pelatihan yang diadakan	Badan Keuangan	2	Kali	
	Persentase laporan diklat dan pelatihan yang disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	551,517,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	639,841,360
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Badan Keuangan	100	%	15,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	100	%	10,783,360

Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK	Badan Keuangan	100	%	161,517,500.00	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	100	%	182,475,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang di sediakan	Badan Keuangan	2774	Kotak	70,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	2774	Kotak	14,137,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak	Badan Keuangan	48393	Lembar	65,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Keuangan	48393	Paket	115,210,000
	Jumlah barang yang digandakan	Badan Keuangan	20000	Lembar			Jumlah barang yang digandakan	Badan Keuangan	20000	lembar	
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			Laporan	10300000
							Jumlah mainin Kunjungan Tamu yang disediakan			Kotak	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Yang di sediakan	Badan keuangan	36	Exemplar	65,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan keuangan	36	Dokumen	126,211,000
	Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Badan Keuangan	12	Buah							
	Jumlah Paket Iklan yang disediakan	Badan Keuangan	1	Paket							

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar yang dihadiri/Dikuti	Badan Keuangan	60	Kali	175,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPERANGKAT DAERAH	Badan keuangan	60	Laporan	180,725,000
							Jumlah mamin Rapat SKPERANGKAT DAERAH yang disediakan	Badan keuangan		Kotak	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, Dalam Setahun	Badan Keuangan			413,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun	Badan Keuangan	0	0	1,138,297,970
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Badan keuangan	1	unit	472,468,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan	Badan Keuangan	2	unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Badan keuangan	1	unit	313,761,000
Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	5	Unit	25,000,000.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Badan Keuangan	5	Unit	25,883,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	1	Unit	363,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Badan Keuangan	1	Unit	293,590,970

	Jumlah peralatan kerja yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	30	unit				Badan Keuangan			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Badan Keuangan	3	unit	25.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Badan Keuangan	3	unit	32.595,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	1.097.500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	1.129.118,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Badan Keuangan	400	Surat	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Keuangan	400	Laporan	2.500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayarkan	Badan Keuangan	12	Rekening	466.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Keuangan	12	Laporan	451.703,000
	Jumlah rekening telepon yang di bayarkan	Badan Keuangan	12	Rekening			Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	Badan Keuangan	12	Kali	
	Jumlah rekening Telepon/internet yang di bayarkan	Badan Keuangan	12	Rekening							

	Jumlah rekening air yang dibayar	Badan Keuangan	12	Rekening							
	Jumlah Jasa Sewa Hosting / VPN yang dibayar	Badan Keuangan	1	Paket							
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	Badan Keuangan	103	Buah	25,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	103	Laporan	59,400,000
	Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan	Badan Keuangan	24	Bulan			Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan	Badan Keuangan	24	Bulan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah Orang x Bulan)	Badan Keuangan	114	Orang / Bulan	610,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Keuangan	114	Orang / Bulan	615,515,000
	Jumlah Pembayaran Lembur (Jumlah Orang x Bulan)	Badan Keuangan	17712	Orang/ Jam							
	Jumlah Benda Pos yang Diadakan	Badan Keuangan	816	Buah							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	277,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	277,970,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar pajaknya	Badan Keuangan	1	Unit	45,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Badan Keuangan	1	Unit	62,000,000
	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (jml unit kendaraan x jml pemeliharaan)	Badan Keuangan	1	Unit / Tahun							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayar pajaknya	Badan Keuangan	39	Unit	52,500,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Keuangan	39	Unit	68,900,000
	Jumlah Pemeliharaan Mobil Dinas / Operasional (jml unit kendaraan x jml Pemeliharaan)	Badan Keuangan	1	Unit / Tahun							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara (Jml Unit x Jml Pemeliharaan)	Badan Keuangan	45	Kali	15,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Badan Keuangan	45	Kali	32,070,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Badan Keuangan	-	m ²	100,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Badan Keuangan	1	Unit	100,000,000

	Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1	Paket			Luasan gedung kantor yang dipelihara	Badan Keuangan			
	Pemeliharaan Mebel	Badan Keuangan	10	knli	25,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Badan Keuangan	10	kali	15,000,000
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan	100	%	500,090,314,760	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	441,893,123,915
	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Badan Keuangan	85	%			Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Badan Keuangan	85	%	
	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP	Badan Keuangan	100	%			Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP	Badan Keuangan	100	%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Keuangan	100	%	1,303,648,900	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah regulasi dalam Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	Badan Keuangan	2	Doku men	999,965,500

	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100	%							
	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil Pembinaan	Badan Keuangan	100	%							
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Badan Keuangan	94	Dokumen	243,203,000.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Badan Keuangan	94	Dokumen	99,351,000
	Persentase Belanja Pendidikan	Badan Keuangan	20	%			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	4	kali	
	Persentase Belanja Kesehatan	Badan Keuangan	20	%							
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Badan Keuangan	94	Dokumen	71,493,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Badan Keuangan	94	Dokumen	99,084,000
	Persentase Belanja Pendidikan	Badan Keuangan	20	%			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	4	kali	
	Persentase Belanja Kesehatan	Badan Keuangan	20	%							
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Badan Keuangan	47	Dokumen	23,001,000.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Badan Keuangan	235	Dokumen	
	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi	Badan Keuangan	47	Dokumen				Badan Keuangan			

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47	Dokumen	32,487,000.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD yang disusun	Badan Keuangan	235	Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang di diverifikasi	Badan Keuangan	47	Dokumen				Badan Keuangan			
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47	Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Badan Keuangan	92	Dokumen	20,550,000
	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	Badan Keuangan	47	Dokumen							
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47	Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Badan Keuangan	92	Dokumen	31,700,000
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Badan Keuangan	47	Dokumen							
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	1	Dokumen	367,365,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Keuangan	2	Dokumen	495,246,500
	Jumlah Perda APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	1	Dokumen							

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbuap Perubahan APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	1	Dokumen	418,682,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Keuangan	5	Dokumen	222,863,500
	Jumlah Perda Perubahan APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	1	Dokumen	-						
Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Bimtek Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1	Kali	147,417,500.00	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Badan Keuangan	2	Dokumen	31,170,500
	Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan APBD	Badan Keuangan	2	Dokumen	-						
	Jumlah Regulasi yang disusun	Badan Keuangan	1	Dokumen	-						
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	829,229,500	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	12	Dokumen	829,229,500.00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian	Badan Keuangan	264	Laporan	153,213,500	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Keuangan	264	Dokumen	153,213,500

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Badan Keuangan	2	laporan	5,580,000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Badan Keuangan	1	laporan	5,580,000
Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SKPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Badan Keuangan	14,300	Surat	529,142,000	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SKPD	Badan Keuangan	28184	Dokumen	585,478,000
	Jumlah SKPD yang diterbitkan	Badan Keuangan	1,235	Surat							
	Jumlah SPM yang diterbitkan	Badan Keuangan	14,300	Surat							
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dan Koordinasi Dana Transfer	Badan Keuangan	30	laporan	22,857,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Keuangan	30	laporan	22,857,000
	Jumlah LK1 (Laporan Konfirmasi Transfer)	Badan Keuangan	4	laporan							

						Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan lembaga Keuangan Bukan Bank		42	Dokumen	3,022,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Gejri	Badan Keuangan	12	Kali	89,858,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Badan Keuangan	478	Laporan	83,813,000
	Jumlah Laporan Kas Mingguan	Badan Keuangan	48	Laporan							

	Jumlah Pembinaan SKPD	Badan Keuangan	4	Kali							
	Jumlah Rekonsiliasi Gaji	Badan Keuangan	28	Kali							
	Jumlah SKPP yang diterbitkan	Badan Keuangan	450	Surat							
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi BKU	Badan Keuangan	4	Kali	28,579,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Keuangan	270	Dokumen	28,579,000
	Jumlah Rekonsiliasi DTH / RTH	Badan Keuangan	12	Kali							
	Jumlah rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jamin	Badan Keuangan	254	Kali							
	Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional	Badan Keuangan	4	Laporan							
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		188	Orang	146,686,500
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan verifikasi	Badan Keuangan	100	%	984,475,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP	Badan Keuangan	2	Dokumen	984,475,000

	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%							
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah	Badan Keuangan	12	Kali	121,955,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Badan Keuangan	168	Kali	108,430,000
	Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi Pengeluaran Kas Daerah	Badan Keuangan	13	Kali			Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	Badan Keuangan	1400 0	Kali	
	Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	Badan Keuangan	12	Kali							
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Badan Keuangan	180	Kali	126,172,000.00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Badan Keuangan	732	Dokumen	125,222,000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	6	Kali	140,620,000.00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun	Badan Keuangan	18	Laporan	127,518,000

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Badan Keuangan	47	laporan	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Badan Keuangan	134	laporan	39,550,000
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun	Badan Keuangan	170	Laporan						
	Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana	Badan Keuangan	10	%						
	Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	Badan Keuangan	1	%						
	Rasio anggaran sisa thd total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Badan Keuangan	0.1	%						
	Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	Badan Keuangan	1%	Kali						
	Jumlah Dokumen yang dapat di akses publik thd informasi kenda	Badan Keuangan	100%	Dokumen						

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Keuangan	2	Dokumen	185,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	9	Dokumen	159,438,000
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Badan Keuangan	12	Dokumen	44,776,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Keuangan	2	Dokumen	107,014,000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Badan Keuangan	2	Dokumen	119,758,000.00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Keuangan	5	Dokumen	171,339,000

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akuntansi Pemerintah	Badan Keuangan	2	Kali	246,194,000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	3	Kali	145,964,000
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	496,947,961,360	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dlm setahun	Badan Keuangan	100	%	438,776,688,415
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan ADD	Badan Keuangan	213	Desa	476,134,696,214,64	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan ADD	Badan Keuangan	213	Desa	422,540,805,600
	Jumlah desa yang mendapatkan SARPRAS	Badan Keuangan	213	Desa			Jumlah desa yang mendapatkan SARPRAS	Badan Keuangan	213	Desa	
	Jumlah desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan BINA MITRA	Badan Keuangan	9	Desa			Jumlah desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan BINA MITRA	Badan Keuangan	9	Desa	
	Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT	Badan Keuangan	5604	RT			Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT	Badan Keuangan	5604	RT	
	Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW	Badan Keuangan	1212	RW			Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW	Badan Keuangan	1212	RW	

							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Keuangan	12	Dokumen	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah desa yang mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah	Badan Keuangan	213	Desa	11.411,630,000.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Keuangan	10	Dokumen	6.834,247.670
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah	Badan Keuangan	213	Desa	9.401,635,145.40	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Badan Keuangan	10	Dokumen	9.401,635,145
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	12	Dokumen	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	25,000,000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100	%	302,765,500
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2	Kali	25,000,000.00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Badan Keuangan	1	Dokumen	241,765,500

		Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan:	Badan Keuangan	2	Kali		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		92	Orang	61.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Badan Keuangan	100	%	1.100.838.500	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Badan Keuangan	85	%	1.100.838.500
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%	1.100.838.500	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	85	%	1.100.838.500
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah SKPD yang menyampaikan usulan SSU	Badan Keuangan	17	SKPD	80.000.000.00	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Hargayang Disusun	Badan Keuangan	1	Dokumen	159.053.000

	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	6	Kali							
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1	Kali	110,885,396	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	47	SKPD	51,480,500
	Jumlah dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2	Dokumen							
	Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD	Badan Keuangan	47	Laporan							
	Jumlah SK Penetapan Status Penggunaan yang disusun	Badan Keuangan	47	Laporan							
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1	Dokumen	96,162,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah inventarisasi jenis BMD yang dicatat	Badan Keuangan	5	Laporan	157,155,874	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	1	Laporan	175,148,500
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		5	Laporan	46,162,000

4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kategori Baik	Badan Keuangan	100	%	2,267,209,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD	Badan Keuangan	8	%	2,267,209,000
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perda/Perbup tentang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan	100	%	2,267,209,000	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Dibanding Tahun sebelumnya	Badan Keuangan	2	%	2,267,209,000
		Persentase Laporan Pendapatan Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100	%							
		Persentase kegiatan intensifikasi Pajak Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	100	%							
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Perencanaan Pendapatan	Badan Keuangan	1	Dokumen	98,426,000.00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Keuangan	8	Dokumen	93,748,000
		Jumlah Pendampingan	Badan Keuangan	2	Kali							
		Jumlah Survey Potensi Pajak Daerah	Badan Keuangan	1,000	Wajib Pajak							
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah,	Jumlah Binitck yang dislenggarakan	Badan Keuangan	1	Dokumen	90,533,000.00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	Badan Keuangan	3	Dokumen	89,873,000

							Kebijakan Pajak Daerah					
	Jumlah Koordinasi tentang pengembangan Pajak Daerah	Badan Keuangan	2	Kali								
Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan			29,215,000.00							
	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	Badan Keuangan										
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Pengelolaan Pajak Daerah yang diadakan	Badan Keuangan			12,340,000.00							
	Luasan sarana prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang diadakan	Badan Keuangan										
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Honor TIM	Badan Keuangan	1	Kali	1,037,911,000.00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Laporan	20,338,000	
	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Badan Keuangan	3	Dokumen								

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Monitoring Pendapatan Daerah dan PBB	Badan Keuangan	19	Kali		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Laporan	10,765,000
	Jumlah Pemeriksaan Obyek Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Kali							
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Pajak daerah yang dipelihara	Badan Keuangan	1	Aplikasi		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Badan Keuangan	12	Dokumen	1,031,411,000
	Jumlah DHKP, SPT dan SKPD yang dicetak	Badan Keuangan	10	Box							
	Jumlah Himbauan Pajak (Brosur, Pamflet, dll)	Badan Keuangan	1.000	Lembar							
	Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan	Badan Keuangan	615,750	OP							
	Jumlah Pajak yang ditetapkan	Badan Keuangan	6,600	WP							
	Jumlah Pendampingan	Badan Keuangan	2	Kali							
	Jumlah SPT dan SKPD yang dicetak	Badan Keuangan	655,000	Lembar				Badan Keuangan			
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Konsultasi Pajak Daerah	Badan Keuangan	4	Kali	39.790,000.00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Badan Keuangan	40	Layanan	24,867,000
	Jumlah Pendampingan Pajak Daerah	Badan Keuangan	4	Kali				Badan Keuangan			
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan Tepat Waktu	Badan Keuangan	12	Laporan	91,500,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Badan Keuangan	7	Dokumen	96,635,000

	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan intensifikasi Pajak Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	195	Kali	180,000,000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Badan Keuangan	240	Dokumen	179,706,000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Badan Keuangan	24	laporan	687,494,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Keuangan	8	Dokumen	709,866,000
		Jumlah dokumen Realisasi PBB yang di publikasikan di website	Badan Keuangan	1	Dokumen							
		Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	Badan Keuangan	5	Kali							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan merupakan Organisasi Perangkat Daerah teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum fungsi penunjang urusan keuangan dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat maupun pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, tetap berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/ Kelurahan (Musrenbangdes / Musrenbangkel). Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi. Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2023 :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan dan mengacu pada hasil telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, RKP Nasional Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Ngawi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Periode 2005-2025, maka Tema Pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2023 adalah :

"Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Agribisnis dan Agrowisata yang Didukung oleh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemantapan Infastruktur Wilayah, dan Teknologi Informasi" Selanjutnya tema pembangunan di atas akan diterjemahkan melalui beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi di tahun 2023, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pengembangan pendidikan vokasi pertanian ramah lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- b. Penurunan kemiskinan ekstrim guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi
- d. Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian
- e. Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Berikut ini adalah keselarasan tema RKP Tahun 2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 :



Gambar 3 Keselarasan dengan kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Mengacu Pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2021-2026, Badan Keuangan bertanggungjawab Mendukung Misi Ke 3 Yaitu Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan Tujuan Badan Keuangan yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun renja agar semua program dan kegiatan yang tercantum pada Renja searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan Renja Badan Keuangan sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana program dan kegiatan dalam menjalankan program dan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mendukung program yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Sebagai bahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap indikator program dan kegiatan yang ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran Renja Badan Keuangan yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD.
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.

3.3 Program Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengalihan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sub Kegiatan adalah penjabaran dari proses atau aktivitas pelaksanaan kegiatan.

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3	5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
4	5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
5	5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6	5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2	5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
6	5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1	5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan
2	5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
4	5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
4	5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6	5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
1	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2	5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3	5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
4	5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD
5	5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
6	5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD
7	5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8	5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9	5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
1	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2	5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3	5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SKPD
4	5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5	5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

7	5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
8	5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
1	5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2	5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3	5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
4	5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
6	5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7	5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
8	5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
1	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
3	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
1	5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah
2	5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	
1	5.02.03.2.01.01 Penyusunan SSH
2	5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3	5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
5	5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
6	5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah

7	5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
8	5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
9	5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
10	5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
1	5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2	5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3	5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4	5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5	5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6	5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7	5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
8	5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
9	5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10	5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
11	5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
12	5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tarjet Capaian Kinerja	Tolok Ukur		Target			
5																		
5	02																535,971,283,541	
5	02	01															21,517,097,321	
5	02	01	2.01														184,000,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	19 Dokumen	80,25 Nilai	22,392,000	PEN DAP ATAN TRANSFER		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	14,000,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	1 Dokumen	80,25 Nilai	9,400,000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PADJ)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	1 Dokumen	80,25 Nilai	6,000,000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PADJ)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	2 Dokumen	80,25 Nilai	7,360,000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PADJ)		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0

5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Nilai LHE AKP Perangkat Daerah	100 %	2 Dokumen	80,25 Nilai	5.162.500	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKP Perangkat Daerah	100 %	7 Laporan	80,25 Nilai	113.427.000	PEN DAP ATAN TRANSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	170.000.000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							19.562.213.658			19.758.330.321	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun Jumlah Orang yang Mendorima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LHE AKP Perangkat Daerah	100 %	1120 Orang 76 Orang/bulan 28 Dokumen	an 80,25 Nilai	19.555.276.658	PEN DAP ATAN TRANSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	19.750.879.421
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Nilai LHE AKP Perangkat Daerah	100 %	50 Laporan	80,25 Nilai	6.957.000	PEN DAP ATAN TRANSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	7.500.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							386.362.500			374.767.000	

5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Pakain Batik yang dibeli / diadakan Jumlah pakain dinas dan Kelengkapan yang dibeli/diadakan Jumlah Pakain Olah Raga yang dibeli/diadakan Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah sepatu Olah raga yang di Beli/ diadakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100 %	80,25 Nilai	81.280,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	80,000,000	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah ASN yang Mengikuti diklat/Sosialisasi/ Bimtek Jumlah Diklat dan Pelatihan yang diadakan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100 %	150 Orang 2 Kali 150 Orang	80,25 Nilai	303,082,500	PPN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	289,707,000
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							639,841,360			586,000,000		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase Pemenuhan Kebutuhan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100 %	1 Paket 100 %	80,25 Nilai	10,783,360	PEN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	10,000,000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase pemenuhan kebutuhan ATK	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100 %	1 Paket 100 %	80,25 Nilai	182,475,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	165,000,000

5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah air isi ulang yang disediakan Jumlah Makanan yang di sediakan Jumlah Minuman yang di sediakan Jumlah Minuman yang di sediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100 %	100 Galon 5000 Kotak 250 Dus 1300 Botol / Dus 2 Paket	80,25 Nilai	14,137,000	PEN DAP ATAN TRANSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	70,000,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Barang yang di cetak Jumlah barang yang digandakan Jumlah iklan/pubikasi media cetak Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100 %	50000 lembar 50000 lembar 10 Kali 1 Paket	80,25 Nilai	115,210,000	PEN DAP ATAN TRANSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Jumlah Surat Kabar Yang di sediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100 %	5 Buku 10 Dokumen 5 Eksemplar	80,25 Nilai	126,211,000	PEN DAP ATAN TRANSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	85,000,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100 %	1 Laporan	80,25 Nilai	10,100,000	PEN DAP ATAN ASIL DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0

5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam yang dihadiri/Dikuti Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar yang dihadiri/Dikuti	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah				200 Laporan 200 Kali 200 Kali	80,25 Nilai	180,725,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	250,000,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,138,297,970				230,000,000		
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Unit	80,25 Nilai	472,458,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	1 Unit	80,25 Nilai	313,761,000	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD J)	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	7 Unit	80,25 Nilai	25,880,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	33 Unit	80,25 Nilai	293,590,970	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD J)	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	200,000,000	

5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	5 Unit	80,25 Nilai	32.595,000	PEN DAP ATA N ASLI DAF RAH IPAD I	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	30.000,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.129.118,000		0		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	12 Laporan	80,25 Nilai	2.500,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	60 Laporan	80,25 Nilai	451.791,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	36 Laporan	80,25 Nilai	59.400,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		100 %	2136 Laporan	80,25 Nilai	615.515,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	0
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								277.970,000		384.000,000		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	1 Unit	80,25 Nilai	62.000,000	PEN DAP ATA N ASLI DAF RAH IPAD I	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	55.000,000

5	02	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kandaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinsinya	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanegara	100 %	39 Unit	80,25 Nilai	58,900,000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	78,000,000	
5	02	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	15 Unit	80,25 Nilai	15,000,000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	15,000,000	
5	02	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	47 Unit	80,25 Nilai	32,073,000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	50,000,000	
5	02	01	209	09	Pemeliharaan/Rehab Iliasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab Iliasi	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanegara	100 %	800 m2	80,25 Nilai	100,000,000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun	100 %	150,000,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							441,893,123,915						
5	02	02	201		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							996,955,500						508,215,766,21
																1,168,648,900		

5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Koordinasi dengan SKPD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	94 Dokumen 4 kali	100 %	99.351.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu, dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	215.200.000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Jumlah Koordinasi dengan SKPD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	94 Dokumen 4 kali	100 %	99.084.000	PEN DAP ATAN TRANSFER	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	62.382.000

5	02	02	201	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	92 Dokumen	100 %	20.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	20.075.500
5	02	02	201	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	92 Dokumen	100 %	31.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	28.346.500

5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah dokumen informasi keuangan daerah yang dapat diakses publik Jumlah koordinasi dengan SKPD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	1 dokumen 4 kali 2 Dokumen	100 %	495,246,500	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	320,567,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah dokumen informasi keuangan daerah yang dapat diakses publik Jumlah koordinasi dengan SKPD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	1 dokumen 4 kali 9 Dokumen	100 %	222,863,500	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	365,621,400

5	02	02	7.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Koordinasi/penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib		100 % 100 % 92,5 %	2 Dokumen 4 kali	100 %	31.170,500	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	156.456,500
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							829,229,500		797.252,000			
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kas Ngawi Ngawi Ketenggi	100 % 100 % 92,5 %	204 laporan	100 %	153,213,500	PEN DAP ATA N TRA NSFER	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	131.478,000

5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebeumnya	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebeumnya Persentase SLPA terhadap APBD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 % 100 % 92,5 %	1 Laporan 6,7 %	100 %	5,580,000	PEN DAP ATA N TRA NSFE R	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	5,580,000
5	02	02	2.02	03	Penetapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SKPD	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SKPD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 % 100 % 92,5 %	28184 Dokum	100 %	385.470,000	PEN DAP ATA N TRA NSFE R	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	397,398,500

5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggul	100 % 100 % 92,5 %	42 Dokumen	100 %	22.857.000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	32.355.000
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib		100 % 100 % 92,5 %	1 Dokumen	100 %	3.022.500	PEN DAP ATA N ASLI DAE BAH IPRO I	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	0

5	02	02	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggul	100 % 100 % 92,5 %	478 Laporan	100 %	83,813,000	PEN DAP ATA N TRA NSFE R	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	195,014,000
5	02	02	202	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggul	100 % 100 % 92,5 %	278 Dokumen	100 %	28,579,000	PEN DAP ATA N TRA NSFE R	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	32,404,000

5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketungg	100 % 100 % 92,5 %	188 Orang	100 %	146,686,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	3,022,500
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							984,475,000		945,275,000			
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah jumlah verifikasi dan pengujian atas bukti memonal yang dilakukan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib		100 % 100 % 92,5 %	144 Laporan 16000 kali	100 %	108,430,000	PEN DAP ATA N TRA NSFE R	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	121,955,000

5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	732 dokumen	100 %	125,272,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD DAERAH	100 % 100 % 92,5 %	122,570,000
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	18 kali	100 %	177,518,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	122,518,000

5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, SLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen yang dapat diakses publik thd informasi keuda Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana Rasio anggaran sisa thd total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertinggi	100 % 100 % 92,5 %	1 dokumen 134 Laporan 1 kali 1 % 10 % 0,1 %	100 %	90.550.000	PDN DAP ATA N IRA NSFF R	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	11.102.000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab yang disusun Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tinggi	100 % 100 % 92,5 %	9 dokumen 0 Dokumen	100 %	159.438.000	PN DAP ATA N TRA NSFF R	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	169.302.000

5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertip	100 % 100 % 92,5 %	7 dokumen 0 Dokumen	100 %	107.014.000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	44.776.000
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertip	100 % 100 % 92,5 %	0 Dokumen 5 dokumen	100 %	171.556.000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	109.756.000

5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	2 kali	100 %	145,964,000	PEN DAP ATA N TRA NSFE R	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	236,194,000
5	02	02	2.04	Peningkatan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								438,776,688,415	1.506,259,327,717			
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan persentase belanja urusan pemerintahan umum(jikurang transfer expenditures)	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	852 Laporan 1 %	100 %	422,348,805,600	Dana Trans fer Umum- Dana Alokasi Umum	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	483,788,389,741

5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak jumlah SP2D yang diterbitkan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 97,5 %	10 Laporan 10 dokumen	100 %	6.839,247,670	Dana Trans for Umum-Dana Alokasi Umum	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	11.411,630,000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota jumlah SP2D yang diterbitkan persentase jumlah bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	10 Laporan 10 dokumen 100 %	100 %	9.401,635,175	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAN (PAD)	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	1,011,050,307,976
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						302,765,500		57,000,000			

5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	1 Dokumen	100 %	241,765,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	57,000,000
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 % 100 % 92,5 %	92 Orang	100 %	61,000,000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD I)	persentase dokumen penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100 % 100 % 92,5 %	0
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							1,100,838,500		1,319,634,770		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							1,100,838,500		1,319,634,770		

5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD Jumlah SKPD yang menyampaikan usulan 5SH jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase Pengelolaan Barang Milk Daerah (BMD) Kategori Tertib	91 %	6 Kali 47 SKPERANG KAT DAERAH 1 Dokumen	85 %	159,053,000	PEN DAP ATA N TRA NSFER	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	91 %	80,000,000
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milk Daerah (BMD) Kategori Tertib	91 %	47 Dokumen	85 %	51,480,500	PEN DAP ATA N TRA NSFER	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	91 %	104,815,395
5	02	01	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milk Daerah (BMD) Kategori Tertib	91 %	1 Dokumen	85 %	95,152,000	PEN DAP ATA N ASLI DAERAH (PAD I)	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	91 %	104,815,395
5	02	03	2.01	05	Pentatausahaan Barang Milk Daerah	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	Jumlah Laporan Pentatausahaan Barang Milk Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milk Daerah (BMD) Kategori Tertib	91 %	1 Laporan	85 %	173,148,500	PEN DAP ATA N TRA NSFER	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	91 %	148,979,874
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milk Daerah	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milk Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milk Daerah (BMD) Kategori Tertib	91 %	5 Laporan	85 %	46,162,000	PEN DAP ATA N ASLI DAL RAH (PAD I)	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	91 %	148,979,874
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milk Daerah	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	Jumlah dokumen asli kepemilikan BMD yang disimpan Jumlah Koordinasi dengan SKPD Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milk Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milk Daerah (BMD) Kategori Tertib	91 %	2 Dokumen 6 Kali 4 Laporan	85 %	241,514,500	PEN DAP ATA N TRA NSFER	persentase pengelolaan barang milk daerah kategori tertib	91 %	266,885,960

5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	persentase PAD terhadap APBD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah jumlah fasilitas dan koordinasi kegiatan perencanaan pendapatan jumlah pendampingan aplikasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Kategori Baik	8,5 %	5 Dokumen 10 kali 2 kali	100 %	93,748,000	PEN DAP ATAN TRANSFER	persentase PAD terhadap APBD	8,5 %	77,305,000
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	persentase PAD terhadap APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah jumlah asistensi Simtek pengelolaan pajak yang diselenggarakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	8,5 %	3 dokumen 15 orang	100 %	89,873,000	FFN DAP ATAN TRANSFER Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	persentase PAD terhadap APBD	8,5 %	73,885,000
5	02	04	2.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	persentase PAD terhadap APBD	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	8,5 %	12 Laporan	100 %	20,138,000	PLN DAP ATAN TRANSFER Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	persentase PAD terhadap APBD	8,5 %	12,310,000
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	persentase PAD terhadap APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	8,5 %	12 Laporan	100 %	20,765,000	PEN DAP ATAN TRANSFER	persentase PAD terhadap APBD	8,5 %	12,310,000

5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	persentase PAD terhadap APBD	Jumlah Dokumen Keputusan Pajak Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	8,5 %	12 Dokumen	100 %	1.031.411,000	PEN DAP ATAN TRANSFER	persentase PAD terhadap APBD	8,5 %	959.575,000	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	persentase PAD terhadap APBD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	8,5 %	40 Layanan	100 %	34.867,000	PEN DAP ATAN TRANSFER	persentase PAD terhadap APBD	8,5 %	37.990,000	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	persentase PAD terhadap APBD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi persentase deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	8,5 %	7 Dokumen	100 %	96.635,000	PEN DAP ATAN TRANSFER	persentase PAD terhadap APBD	8,5 %	47.395,500	
5	02	04	2.01	11	Penelitian Pajak Daerah	persentase PAD terhadap APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	8,5 %	240 Dokumen	100 %	179.706,000	PEN DAP ATAN TRANSFER	persentase PAD terhadap APBD	8,5 %	145.000,000	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	persentase PAD terhadap APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	8,5 %	8 Dokumen	100 %	709.866,000	PEN DAP ATAN TRANSFER	persentase PAD terhadap APBD	8,5 %	666.494,000	
TOTAL														468.558.716,403			531.971.283,41

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan serta visi misi Pemerintah Kabupaten Ngawi 2021 -2026 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2023. Renja Badan Keuangan ini sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, selain itu, Renja Badan Keuangan Tahun 2023 juga memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun sebelumnya. Renja Badan Keuangan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Renja Badan Keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Badan Keuangan , maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan asset daerah;

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

Dengan tersusunnya Renja Badan Keuangan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Akhir kata semoga Renja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governan*.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO